

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- _____ , 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Baraba, Badar, 2010, *Peraturan Jabatan Notaris Indonesia*, Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, UNPAD, Bandung.
- Baswedan, Ismet, 2004, *Hukum Acara Perdata Peradilan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya.
- K. Lubis, Suhrawardi, 2002, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ , 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notosoedirjo, R, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Masa Akan Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Prajitno, A.A. Andi, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Tedjosaputro, Liliana, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta.

_____, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tobing, G.H.S., Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Kedua*, Erlangga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sujamto, 1993, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal, Asikin dan Arnirudin, 2004, *Pengantar Meade Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tesis :

Rika Refianti, “**Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**” *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014.

Zulfikar Samsul, “**Upaya Hukum Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Daerah Tentang Persetujuan Notaris Untuk Diperiksa Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris**” *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/2013 tanggal 28 Mei 2013.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Hukum.

Majalah dan Jurnal :

Jusuf Patrik, *Notaris Adalah Sebuah Profesi*, Majalah Renvoi, Nomor 4.16II Tanggal 3 September 2004.

Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Majalah Triwulan, 2000.

Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, 2000.

Wawan Setiawan, *Notaris Professional Dan Ideal*, Media Notariat, 2004.

Internet :

Dyah Madya Ruth, “Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC”, <http://www.indonesianotarycommunity.com>, diakses tanggal 10 Maret 2017